



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan Telp. (061) 7865586 - 7867776
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/ 33 /BAPENDASU/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : 800 /33/ BAPENDASU / 2023 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 6 Januari 2023 Tahun Anggaran 2023.
 - b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 821.23/171/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - c. bahwa berdasarkan maksud butir a dan b perlu melakukan Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/20/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH



ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
5. Masing-masing yang bersangkutan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 000/385/BARPENDKESU/III/2023
TANGGAL : 01 MARET 2023

No	NUM/NIP/PANGKAT/GOL. RUMAH	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN PADA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	SY AFIIL LAHRU LUBIS, SE NIP. 1570916 200212 1 005 Pangkat Tingkat I (III/d)	Kepala UPT PPD Siboga BAPENDASU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 UPT. PPD Pandan	Penunjang Unsuran Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Unsuran Pemerintahan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1. Pemindahan Tugas ASN 2. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 2. Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Perencanaan Pajak Daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan Pendapatan Daerah		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN II PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 600 / 565 / BAPENDASU / III / 2023
TANGGAL : 01 MAREK 2023

No. Nama/NIP/Pangkat/GOL. RUANG	JABATAN/PADA/OPD	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN PADA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN
2 M. SMARIAL NASUTTON, S.Sos NIP. 19690505 199103 1 006 Pernah Tingkat I (III/d)	Kepala UPT PPD Simalungun BAPENDASU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 UPT. PPD Tinggi- Tinggi 2 UPT. PPD Medan Utara 3 UPT. PPD Lima Puluh 4 UPT. PPD Gunung Tua 5 UPT. PPD Pematang Siantar 6 UPT. PPD Kota Pinang 7 UPT. PPD Kabanjahe	Penunjang Urusan Pemerintahan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Pemindahan Tugas ASN 2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-Undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertnahan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO. NAMA/NIP/PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN PADA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN
3 MAULI SARIH, SE NIP - 19790511 200902 2 002 Perata (III/c)	Fungsional Umum BPPRDSU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 Sekretaris 2 UPT. PPD Stabat 3 UPT. PPD Pangkalan Brandan 4 UPT. PPD Binjai 5 UPT. PPD Padang Sidempun 6 UPT. PPD Natal 7 UPT. PPD Panyabungan 8 UPT. PPD Teluk Dalam 9 UPT. PPD Gunung Stoli 10 UPT. PPD Dolok Sanggul 11 UPT. PPD Dolok Sanggul	Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Pemindahan Tugas ASN 2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan Pendapatan Daerah		

PELABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN IV
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 000/385/B/APPENDASU/III/2023
TANGGAL : 01 Maret 2023

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL. RUMAH	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGETOLAK KEGIATAN PADA (PPK) Pada :	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4	FAIZAL MAMUDA NASUTION, S.STP, M.Si NIP. 19911212 201206 1 001 PENALITA (III/C)	Fungsional Umum BPPRODU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 UPT. PPD Balige 2 UPT. PPD Tarutung 3 UPT. PPD Pangururan 4 UPT. PPD Sei Rampah 5 UPT. PPD Sipitok 6 UPT. PPD Kisanan 7 UPT. PPD Aek Kanoppan 8 UPT. PPD Rantau Prapat 9 UPT. PPD Sidikalang 10 UPT. PPD Salak	Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Pemindahan Tugas ASN 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 6 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 7 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 8 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 9 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 10 Penyelenggaraan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

